

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A. M. Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media Group. Jakarta.
- A. Ridwan Halim. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Abdur H. Rahman dan Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung.
- Dudu Duswara Machmuddin. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum-Sebuah Sketsa*. Refika Aditama. Bandung.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2016. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa. Bandung.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana Prenada Media Group. Depok.
- Muhammad Sadi Is. 2017. *pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Munir Fuady. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R.A.W. Rhodes. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks. Governance. Reflexivity and Accountability*. Buckingham. Open University Press. hlm. 49.
- Ridwan Hr. 2010. *Hukum Admnistratsi Negara*. Edisi ke-10, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sjachran Basah. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di fakultas hukum Unair. Surabaya. 1995.
- Sony Hendra Permana . "Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16". Jurnal Hukum. Vol. X. No.3. (2018), hlm. 20, Akses 11oktober 2020. World Bank. 1997. *World Development Report 1997: The State in Changing World*. New York.Oxford University Press. hlm. 49.

Website

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4304430/rincian-isi-paket-kebijakan-ekonomi-ke-16-diperbaharui> . Akses 11 oktober 2020

<https://www.liputan6.com/regional/read/4411804/kafe-dekat-sekolah-di-makassar-jualan-miras-salah-siapa>. Diakses 24 desember 2020, pukul 19.03 WITA

<http://www.ui.ac.id> (Koran online; mabuk-mabukan dalam sejarah) di akses tanggal 16 desember, pukul 10.04

[UNDP, 1997, "Governance for Sustainable Human Development". Melalui http://magnet.undp.org/policy/chapter1](http://magnet.undp.org/policy/chapter1). Akses 11 Oktober 2020.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
- Peraturan Presdien Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Online
- Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2014;
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu.
- Peraturan Walikota Makassar (PERWALI) nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan

LAMPIRAN

Lampiran 1

Google Chrome
o.id/uploads/7306082211840007/IMG20191227201339.jpg

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 8 Telepon 6411 - 436488
MAKASSAR

Nomor Seri - 07 / 38816 / 2015 Kode Pos 90144

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL
NOMOR : 503/9377/BIUPK-B/04/BPTPM

NAMA PERUSAHAAN	TRKARYA MAKMUR MANDIRI, CV
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	B O B B Y / PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB
ALAMAT PERUSAHAAN	JL. AMANAGAPPA NO. 5 MAKASSAR
NOMOR TELEPON	085656473063 FAX
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	
KELEMBAGAAN	PENGEGER
KEGIATAN USAHA (KBLI)	5630
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	PENYEDIAAN MINUMAN

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DIS WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJ USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

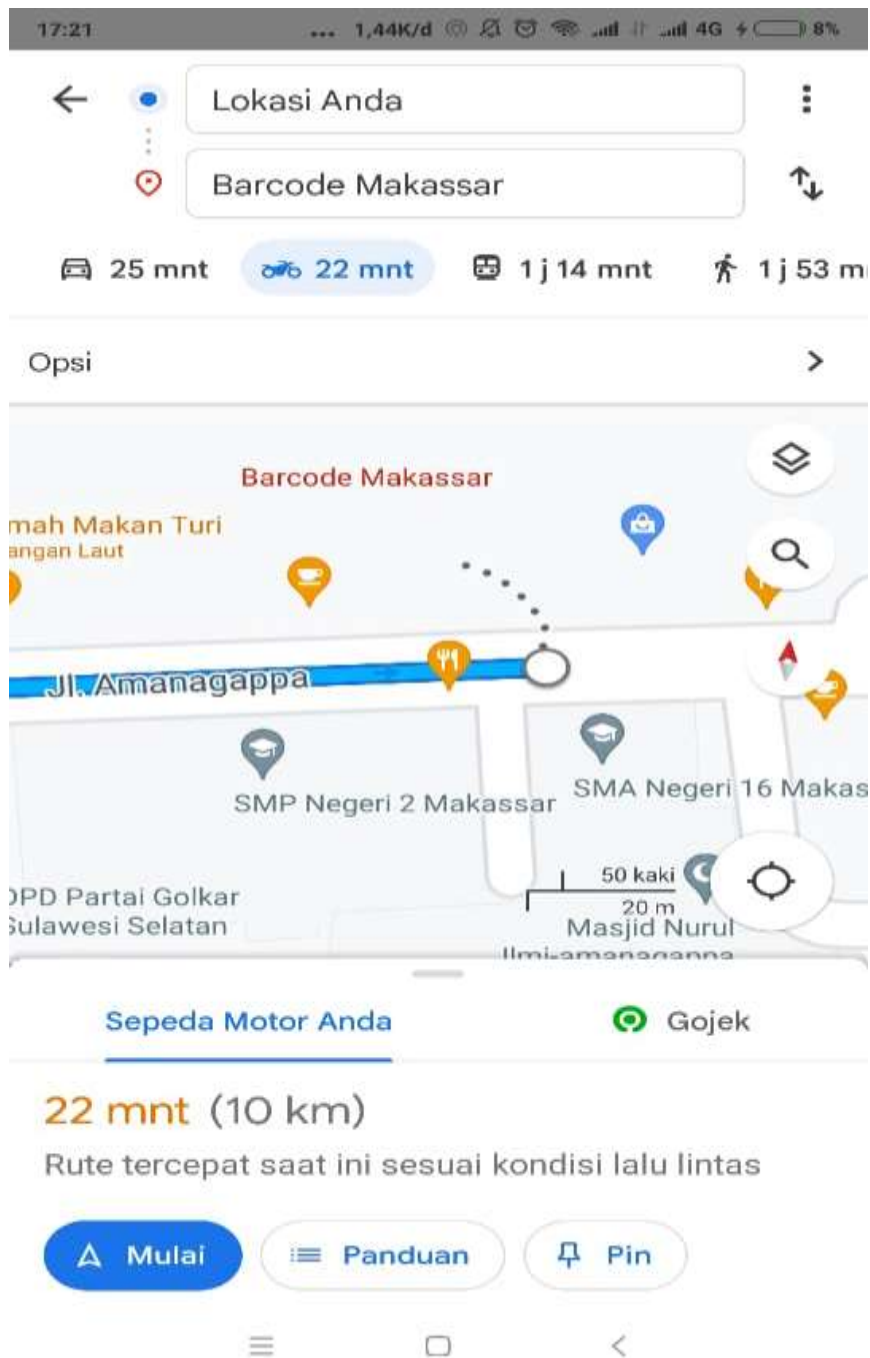
RETRIBUSI Tidak dikenakan Retribusi

  
Kepala
H. TAUFIEK RACHMAN, SE, M
Pembina Utama

Lampiran 2

No. Izin	Nama Pemohon	Tanggal Izin	Nama Badan Usaha	Status Izin
503/12236/IG-B/04/BPTPM	BOBBY	30 Oktober 2015	TRIKARYA MAKMUR MANDIRI	Izin Tele Dico
503/9541 /TDPCV-B/04/BPTPM	BOBBY	30 Oktober 2015	TRIKARYA MAKMUR MANDIRI	Izin Tele Dico
503/9377 /SIUPK-B/04/BPTPM	BOBBY	30 Oktober 2015	TRIKARYA MAKMUR MANDIRI	Izin Tele Dico

Lampiran 3



17:23

... 0,10K/d



SMP Negeri 2 Makassar



Barcode Makassar



1 mnt



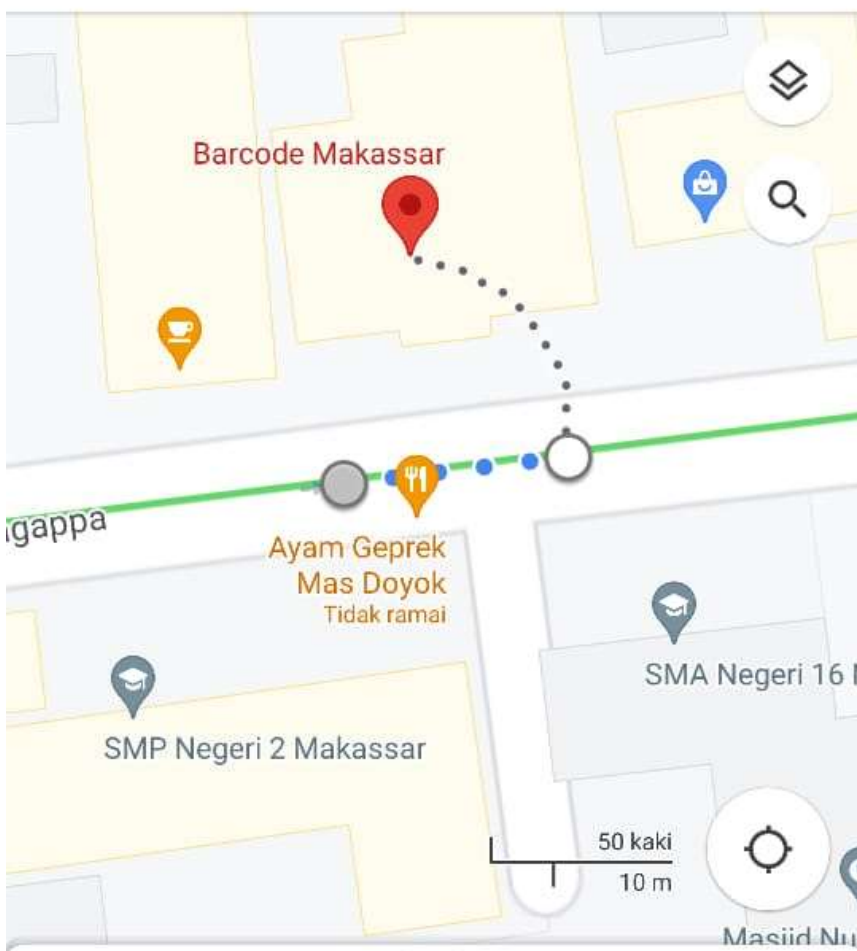
1 mnt



—



1 mnt



0 mnt (20 m)

Via Jl. Amanagappa

>> Pratinjau

☰ Panduan



Lampiran 4

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
PELANGGARAN JAM OPERASIONAL USAHA**

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ Tahun 2021, waktu _____ wita, Tempat
kegiatan perkara di _____ berdasarkan Perwab 51 Tahun 2020 tentang
Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran Walikota Makassar No. 443.01/207/S.Edar/Kesbangpo/V/2021,
tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Covid - 19, Tanggal 18 Mei 2021. Di
Wilayah Kota Makassar dan hasil pemantauan / dilaporkan telah melaksanakan pemeriksaan terhadap

A. PELANGGAR (PELAKU USAHA)

Nama Usaha : _____
Nama Penanggungjawab : _____
Jabatan : _____
Jenis Usaha : _____
Alamat Perusahaan : _____

Telah melanggar Surat Edaran Walikota Makassar No.443.01/207/S.Edar/Kesbangpo/V/2021, tentang
Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Covid - 19 di Kota Makassar, Tanggal 18 Mei 2021.
Jenis Pelanggaran meliputi :

Fasilitas Umum, Café, Restoran dan Rumah Makan, Warung, Game Center, diizinkan sampai jam **22.00**
Wita, mulai tanggal 18 Mei 2021 sampai tanggal 31 Mei 2021;

Kegiatan Café, Restoran dan Rumah Makan hanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung
Jam Operasional untuk Pusat Perbelanjaan / Mall diizinkan sampai dengan jam **21.00** Wita, mulai tanggal
18 Mei 2021 sampai tanggal 31 Mei 2021;

Para Pelaku Usha WAJIB melaksanakan dan Menerapkan Protokol Kesehatan kepada para Pelanggan atau
Pengunjung

B. BARANG BUKTI : Foto dan/atau Video

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Subjek pengaturan bagi
Pelaku Usaha. Dikenakan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 7 pada perwali nomor 51 tahun 2020 berupa,

Teguran Lisan dan Teguran Tertulis;

Penghentian Sementara Kegiatan; dan / atau

Denda administratif :

Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat/Warung, Makan/PKS Paling Banyak Rp. 300.000;

Setiap Pelaku Usaha/Pengelola Transportasi Umum Paling Banyak Rp. 500.000;

Setiap Pelaku Usaha/Pengelola/Penyelenggara Usaha Industri Paling Banyak
5.000.000;

Setiap Pelaku Usaha/Pengelola/Penyelenggara/Penanggung jawab Termi
Pelabuhan, Bandar Udara, Toko, Pasar Modern, Apotek, Toko Obat, Rm
Makan, Café, Restoran, Tempat Wisata, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Area Publik,
Tempat Lainnya Yang Memungkinkan Adanya Kerumunan Massa Dan Fasilitas Un
Paling Banyak Rp. 10.000.000;

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Petugas Pemeriksa
Sat. Pol. PP Kota Makassar

Pelanggar _____